

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Aria, Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014.
- Aria, Zurnetti, Riki Afrizal, dan Aria Pratama. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Penuntutan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press, 2023.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lilik Mulyadi. *Peradilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nilma Suryani. *Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2011.

B. Jurnal

Afifah, Nurul. “Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2023): 144–159.

Hidayat, Rahmat. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2023): 77–92.

Lubis, Diah Ayu. “Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022): 45–62.

Marlina. “Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Equality* 13, no. 1 (2008): 1–10.

Nilma, Suryani. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.” *Jurnal Ranah Research*, Vol. 8, No. 1 (2025) : 190-194

Putri, Dian Ananda. “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Hukum Humaniora*, Vol. 11, No. 3 (2023): 201–218.

Rahmadani, Syafira. “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1 (2022): 32–48.

Riki, Afrizal. “Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 3 : 259-268.

Syafaat Yori, Ridwan, Aria Zurnetti, dan Nani Mulyati. “Penerapan Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8838–8842.

Wahyudi, Setya. “Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 27–44.

Yogie Fachrie, dan Aria. “Implementasi Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT).” *Ranah Research Journal* 7, no. 6 (2025): 4904–4906.

Zulfa, Eva Achjani. “Restorative Justice di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 2 (2006): 203–220.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 46).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), disahkan melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of the Child

D. Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan
Negeri tentang Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Diakses melalui
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (akses: 1 Oktober 2025).

Kejaksaan Republik Indonesia. “Pedoman Penanganan Perkara Anak yang
Berhadapan dengan Hukum.” <https://kejaksaan.go.id>. Diakses pada 2
Oktober 2025.

Kementerian Hukum dan HAM RI. “Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi bagi
Anak dalam Tindak Pidana
Narkotika.” <https://www.kemenkumham.go.id>.

Diakses pada 1 Oktober 2025.

United Nations. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration
of Juvenile Justice (The Beijing Rules), 1985

E. Sumber Wawancara

Wawancara dengan Yossi Harisa, S.H.,M.H, Jaksa Fungsional Bidang Tindak
Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 2 April 2026.